

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Aparat pengawas keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan secara berlapis-lapis, seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten dan Inspektorat Pemerintah Kota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai eksternal auditor dari pemerintahan bertugas melakukan pemeriksaan dan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat daerah merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemeriksaan daerah. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran.

Mulyadi (2004:29) mendefenisikan “auditor pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah”.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak ditemukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka kualitas audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih relatif rendah.

Seperti yang dikemukakan oleh Efendy (2010) dalam penelitiannya kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo masih relatif rendah dikarenakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2007 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2006

menemukan delapan temuan audit tetapi Inspektorat Kota Gorontalo tidak menemukan adanya temuan audit.

Efendy (2010) menyatakan bahwa penyebab rendahnya kualitas audit aparat inspektorat dikarenakan rendahnya kompetensi aparat inspektorat yang disebabkan kurangnya pendidikan dan pelatihan fungsional. Sedikitnya jumlah penduduk Kota Gorontalo juga menyebabkan dekatnya kekerabatan antar sesama yang mengurangi independensi auditor.

Menurut De Angelo, 1981 (dalam Djamil, 2011) mendefinisikan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan dalam sistem akuntansi. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998).



Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998).

Kompetensi dan independensi harus dimiliki oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001) dalam Efendy (2010), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Pengalaman audit merupakan proksi dari keahlian auditor yang akan menentukan pembentukan pertimbangan auditor. Berbagai penelitian auditing menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin mampu ia menghasilkan kinerja yang dalam tugas-tugas yang semakin kompleks (libby 1995 dalam Tri 2005).

Dari penjelasan diatas penulis akan melakukan penelitian terhadap kualitas audit aparat inspektorat dengan memperluas wilayah penelitian yakni pada Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Efendy, Muh. Taufik (2010). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain obyek penelitian yang berbeda yaitu auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menguji kembali faktor-faktor kualitas audit menggunakan empat

faktor kualitas audit. Alasan peneliti menambah satu variabel yaitu Pengalaman Audit karena penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik faktor-faktor kualitas audit yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan.

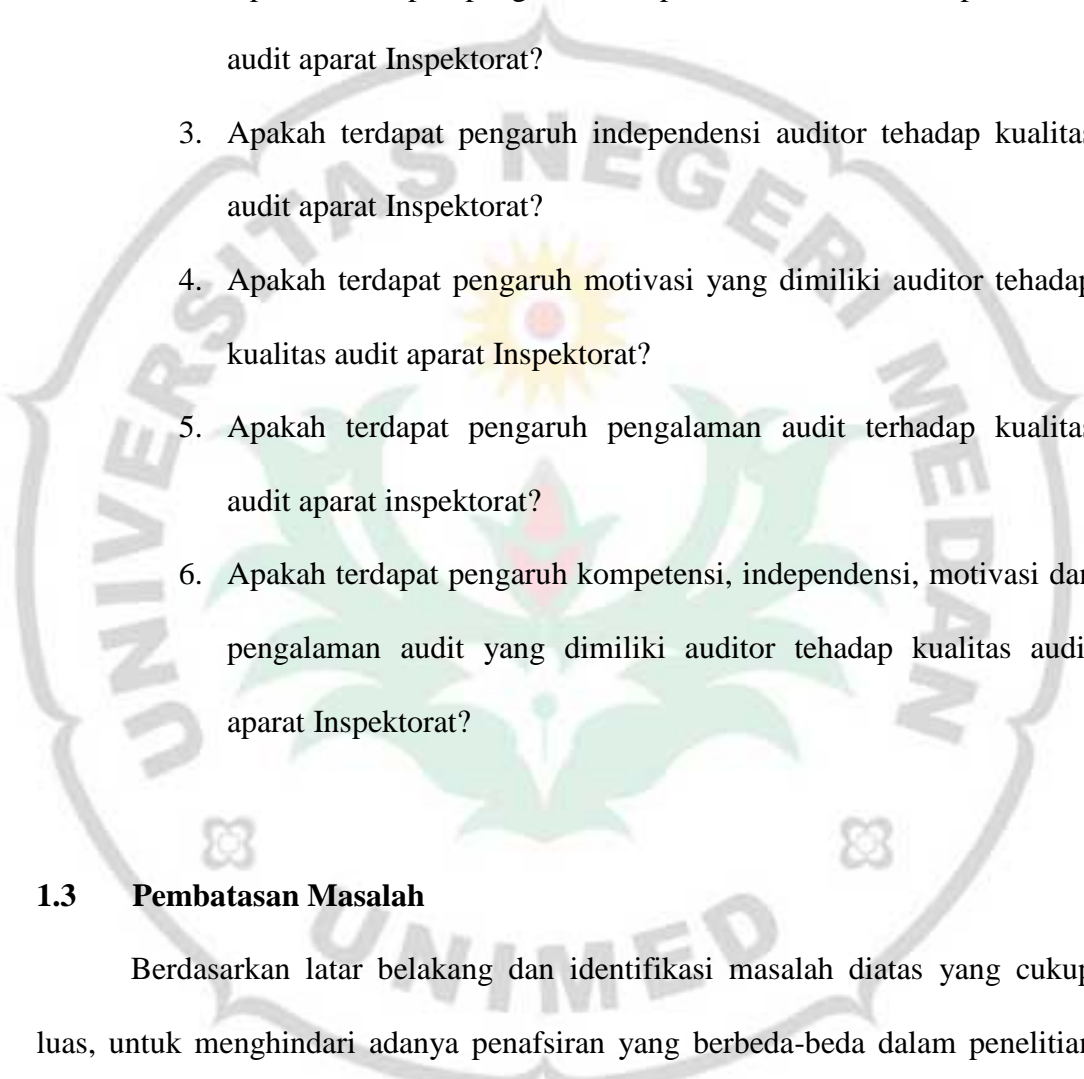
Alasan dilakukan pada inspektorat Provinsi Sumatera Utara karena masih banyak disorot/dilihat akibat dari masih adanya temuan BPK terhadap LKPD yang dapat mengakibatkan kerugian daerah. Kemungkinan banyaknya temuan yang tidak terdeteksi oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Kepala Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang saat ini banyak terjerat kasus korupsi juga mengindikasikan bahwa kurangnya peran Badan Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul : **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil pemeriksaan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang berfungsi sebagai auditor internal dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal?

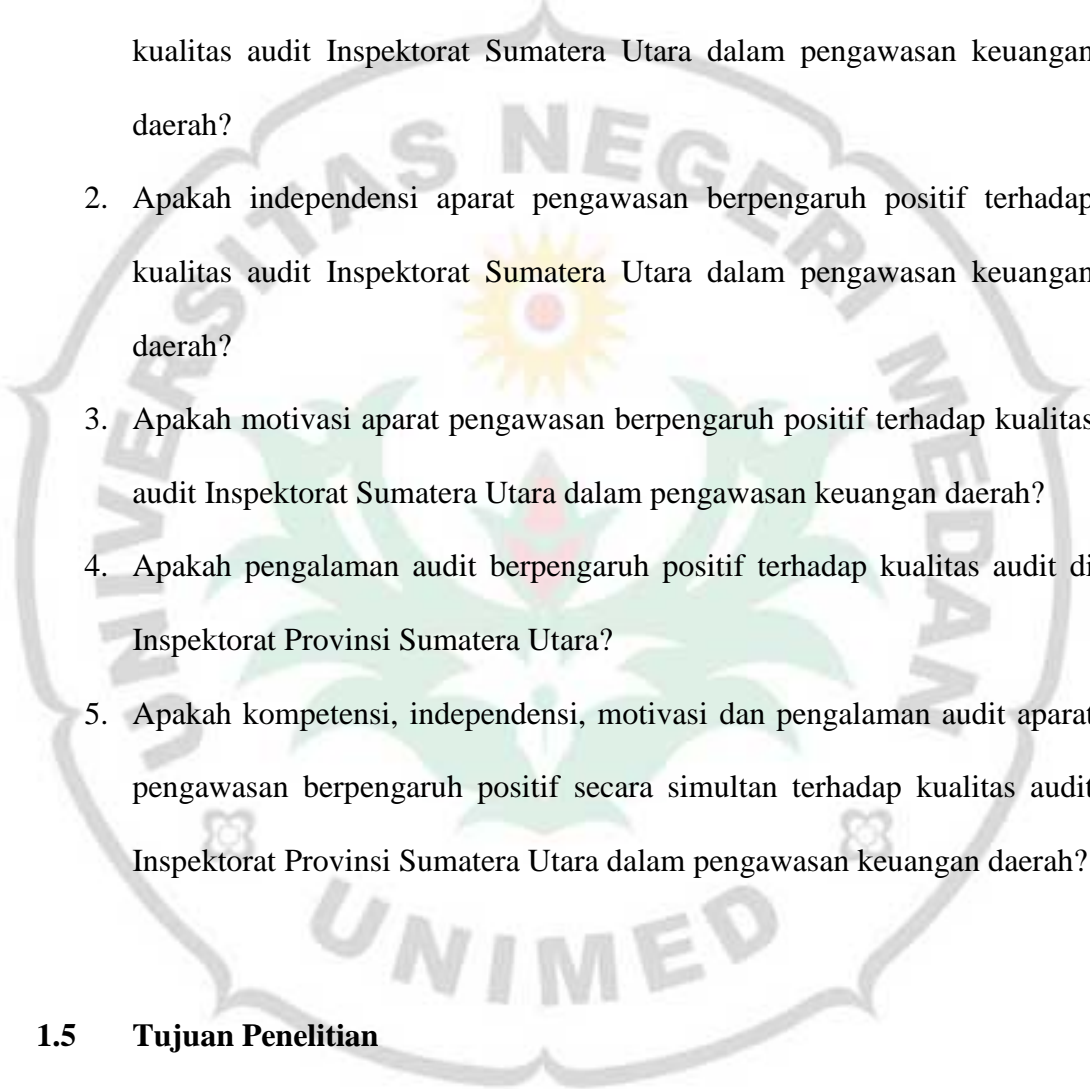
- 
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit aparat Inspektorat?
  3. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit aparat Inspektorat?
  4. Apakah terdapat pengaruh motivasi yang dimiliki auditor terhadap kualitas audit aparat Inspektorat?
  5. Apakah terdapat pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit aparat inspektorat?
  6. Apakah terdapat pengaruh kompetensi, independensi, motivasi dan pengalaman audit yang dimiliki auditor terhadap kualitas audit aparat Inspektorat?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yang cukup luas, untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda dalam penelitian ini dan mengingatkan adanya keterbatasan penulis, maka peneliti membatasi pada pengaruh kompetensi, independensi, motivasi dan pengalaman audit terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

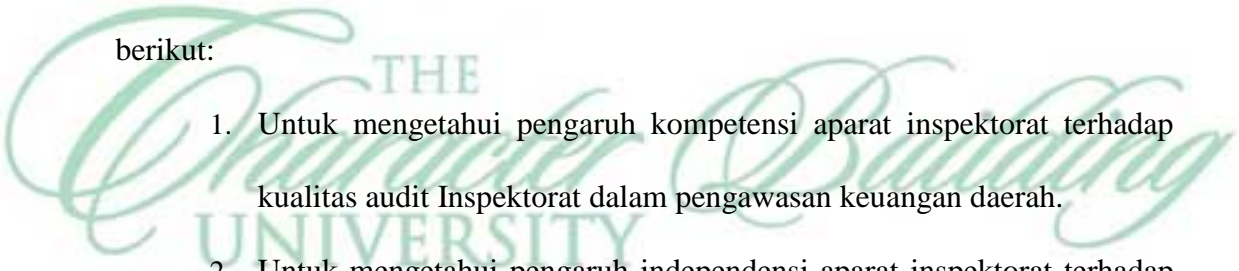
### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 
1. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara dalam pengawasan keuangan daerah?
  2. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara dalam pengawasan keuangan daerah?
  3. Apakah motivasi aparat pengawasan berpengaruh positif terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara dalam pengawasan keuangan daerah?
  4. Apakah pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
  5. Apakah kompetensi, independensi, motivasi dan pengalaman audit aparat pengawasan berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan keuangan daerah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 
1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
  2. Untuk mengetahui pengaruh independensi aparat inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
  3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi aparat inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.



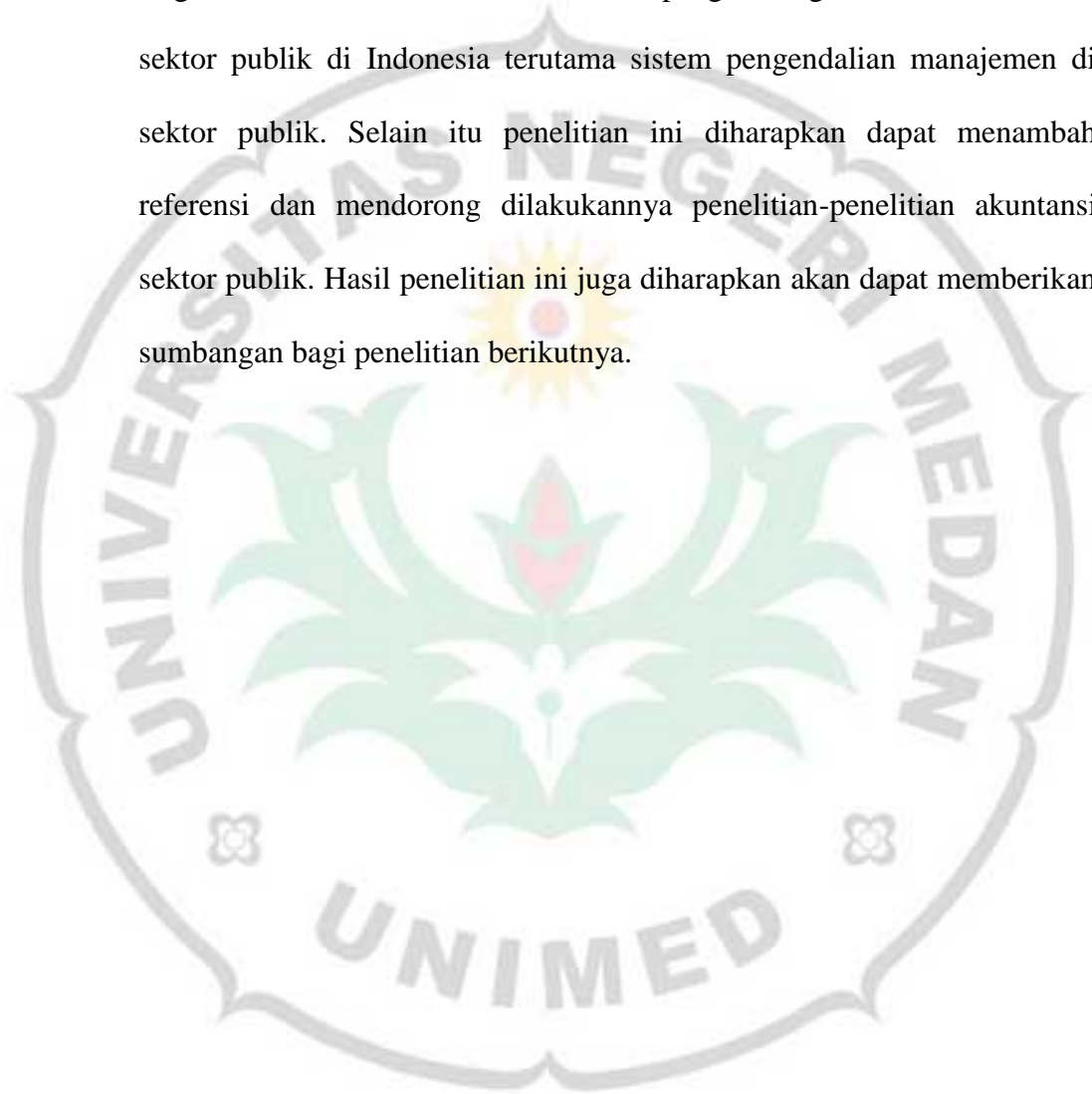
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
5. Untuk mengetahui Pengaruh simultan antara kompetensi, independensi, motivasi dan pengalaman audit aparat inspektorat terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.
3. Bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual yang mempunyai kontribusi yang berarti bagi perkembangan teori dan praktek bagi akuntansi khususnya dibidang audit.

4. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY